ANTISIPASI PENYELEWENGAN, PEMPROP JATIM AWASI KETAT PENGELOLAAN DBCHT

Rabu, 15 Maret 2017

Pemerintah Provinsi Jawa Timur meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBCHT) untuk mencegah penyelewengan. Pengawasan dilakukan secara intens terhadap program kegiatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola DBCHT, mulai Maret hingga November 2017.

Tim khusus dibentuk untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan DBCHT tahun sebelumnya, dengan turun langsung ke OPD pengelola. Tim ini terdiri dari berbagai OPD terkait, termasuk Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD). Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada Kementerian Keuangan.

Jika ditemukan ketidaksesuaian antara program kegiatan DBCHT dengan pelaksanaannya di lapangan, tim khusus akan membuat laporan tertulis kepada Kementerian Keuangan. Pemda yang bersangkutan juga diwajibkan membuat laporan serupa untuk memastikan kesesuaian program.

Selain pengawasan, Pemprov Jatim juga melakukan tindakan preventif dengan memberikan asistensi kepada Kabupaten/ Kota terkait perencanaan program DBCHT. Asistensi ini bertujuan untuk mencegah kesalahan penggunaan DBCHT sejak awal, sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pemprov Jatim juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program kegiatan tahun 2016 yang telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya sisa anggaran atau program yang tidak terlaksana. Pengawasan ini dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap program yang sudah dilaksanakan di tingkat masyarakat.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.